

TINJAUAN

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

Veronica A. Kumurur

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak. Pembangunan merupakan suatu proses dalam keadaan suatu sistem. Dalam proses ini, pembangunan tidak hanya suatu berhubungan dengan sistem pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga berhubungan dengan sistem perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dunia. Namun, pada kenyataannya, pembangunan yang merupakan hasil interaksi dari subsistem sosial dan ekonomi, subsistem lingkungan buatan dan subsistem alam dalam suatu ekosistem perkotaan, melahirkan kondisi yang ambigu dalam suatu masyarakat. Disatu pihak pembangunan kota menjadi kebanggaan masyarakat karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sedang di pihak lain merupakan beban kehidupan bagi kelompok masyarakat tertentu, yaitu: masyarakat miskin kota. Dari data *United Nation* (1997) dikemukakan bahwa situasi kemiskinan yang paling hebat terjadi di negara-negara berkembang, di mana ada sekitar 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan.

Kata kunci: Pembangunan, Kemiskinan Perempuan, Kota

PENDAHULUAN

Saat ini, pembangunan di negara-negara berkembang dan bahkan di negara-negara maju, bukan lagi hanya meningkatkan pendapatan nasional, atau hanya semata-mata menambah produksibarang-barang dan jasa-jasa. Pembangunan mengandung unsur hakiki, yaitu membangun manusia jasmaniah dan rohaniah serta merubah nasib manusia agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Salim dalam Soetarjono 1985). Menurut Teune (1988:39), pembangunan merupakan suatu proses dalam keadaan suatu sistem. Di dalam proses ini, pembangunan tidak hanya berhubungan dengan sistem pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga berhubungan dengan sistem perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di dalam ekosistem bumi ini.

Keberlanjutan lingkungan bermaksud mengubah kegiatan manusiawi agar tidak lagi mengancam sumber daya alam dan sistem ekologis secara mendasar, dimana keduanya sebagai tempat bergantungnya pembangunan ekonomi, kesehatan manusia dan kesejahteraan sosial. Bagi masyarakat Indonesia, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kegiatan manusia yang harus diupayakan secara sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

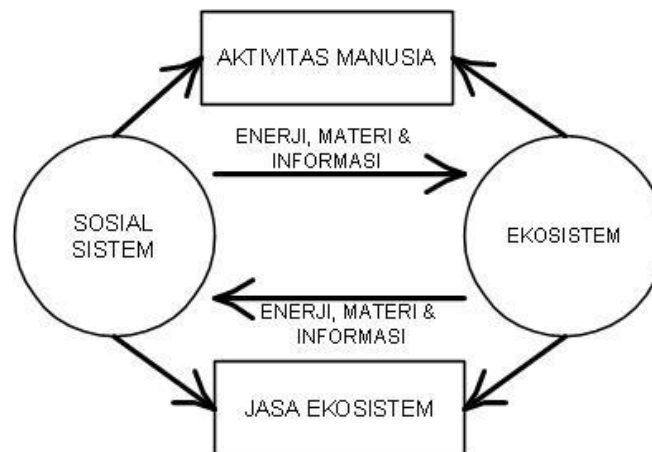
Namun, pada kenyataannya, pembangunan yang merupakan hasil interaksi dari subsistem sosial dan ekonomi, subsistem lingkungan buatan serta subsistem alam dalam suatu ekosistem perkotaan, melahirkan kondisi yang ambigu dalam suatu masyarakat. Disatu pihak pembangunan menjadi kebanggaan masyarakat karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sedang di pihak lain merupakan beban kehidupan bagi kelompok masyarakat tertentu (seperti: menambah beban kehidupan masyarakat miskin kota).

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

Kenyataan ini sedang terjadi pada masyarakat kota-kota besar di Indonesia, seperti Kota Jakarta. Menurut laporan BPS Provinsi DKI Jakarta (2008), bahwa pembangunan kota Jakarta, telah meningkatkan kualitas hidup penduduk kota Jakarta. Ini dinyatakan dengan peningkatan beberapa parameter penting, seperti: (i) jumlah penduduk miskin kota Jakarta turun dari 405,7 ribu (4,48 persen) pada bulan Maret 2007 menjadi sebesar 379,6 ribu (4,29 persen) pada bulan Maret 2008 atau turun sebesar 26,1 ribu (0,19 persen); (ii) inflasi yang relatif rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,04 persen; (iii) UMP DKI Jakarta yang terus meningkat selama tahun 2004-2008 dari 671.550 (2004) menjadi 972.645 rupiah (2008); (iv) meningkatnya tingkat ketepatan pembahagian raskin (beras miskin) kepada rumahtangga miskin, dan (v) menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di sisi lain, konsep pembangunan Kota Jakarta, telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan kota Jakarta, yaitu: (i) ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jakarta sebagai penetral udara semakin sulit diperoleh (Harian Republika, 3 Juli 2003); (ii) tercemarnya air tanah dengan bakteri *ecoli* (Gatra online Jakarta, 30 Juli 2004 tentang Kondisi Air Tanah Jakarta Makin Menurun); (iii) standar mutu udara telah berada di atas ambang batas yang dapat ditolerir oleh kesehatan manusia (Suara Pembaharuan 15 Oktober 2002); dan (iv) daya dukung lahan (0,01) dan daya dukung air (0,08) wilayah DKI Jakarta telah terlampaui (Rakernas AMDAL 2008). Kenyataan yang lain, bahwa pembangunan kota Jakarta masih belum dapat menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat kota. Justru, saat ini, penurunan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin kota Jakarta sedang terjadi. Ini diperlihatkan melalui penggusuran lahan hunian masyarakat miskin kota dalam rangka penataan kota Jakarta.

Dari data *United Nation* (1997) dikemukakan bahwa situasi kemiskinan yang paling hebat terjadi di negara-negara berkembang, di mana terdapat sekitar 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70% di antaranya adalah kaum perempuan. Kondisi ini didukung data yang dikemukakan ILO (2004), yaitu: terdapat 550 juta pekerja miskin di dunia, atau orang yang tidak mampu mengangkat dirinya dan keluarga mereka berpenghasilan di atas US\$1 per hari. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 330 juta atau 60% adalah perempuan.



Gambar 1. Dimodifikasi dari Interaksi Sosial sistem dengan ekosistem

PARADIGMA PEMBANGUNAN

Hakekat pembangunan adalah membangun insani. Oleh karena itu, manusia menjadi faktor utama, baik sebagai subyek maupun obyek, sebab pada dasarnya manusia adalah faktor ekologis utama (Soetaryono 1985:101). Menurut Clapham (1981), manusia adalah bagian dari komunitas biologi yang termasuk di dalam suatu ekosistem. Selain merupakan bagian dari ekosistem yang

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

berinteraksi langsung dengan lingkungannya, manusia juga melakukan interaksi antara manusia lainnya dalam suatu sistem sosial manusia.

Sosial sistem merupakan suatu konsep penting (pusat) dalam ekologi manusia atau ekosistem manusia, karena aktifitas-aktifitas manusia berdampak penting dan kuat terhadap ekosistem melalui masyarakat setempat (Clapham 1981). Menurut Clapham bahwa aktifitas-aktifitas atau aksi bersama terbentuk melalui proses interpretasi terhadap nilai-nilai dan pengetahuan. Hanya manusia dari semua organisme hidup yang mampu berteori, karena itu mereka mampu menemukan cara-cara untuk berinteraksi dengan ekosistem. Melalui aktifitas-aktifitas ini manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain juga berinteraksi dengan ekosistem dalam upaya mempertahankan kehidupannya. Menurut Clapham (1981), bahwa suatu masyarakat dapat merubah suatu ekosistem dan terkadang berkeinginan akan merubah dan merawat suatu ekosistem dalam suatu struktur yang sangat berbeda dari kondisi aslinya (Gambar 1).

Menurut Marten (2001) bahwa teknologi memungkinkan manusia menjabarkan keinginan-keinginan manusia kedalam aksi. Di mana aksi-aksi tersebut merupakan suatu dinamika yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan aktifitas manusia tersebut, menurut Teune (1988:39-40) diartikan sebagai suatu pembangunan.

Menurut Todaro (1994), pembangunan adalah suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti: percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pada dasarnya pembangunan menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan (Todaro 2000). Namun, sebagian besar dimensi pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai suatu peningkatan gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pendapatan, pengembangan ketrampilan dan ketenaga-kerjaan (Keats 2004).

Menurut Keats (2004) secara khusus pembangunan yang bersifat multidimensional memiliki arti dimensi yang berbeda-beda di belahan bumi yang memiliki negara-negara maju dengan di belahan bumi yang masih memiliki negara-negara yang belum dan sedang berkembang.

Menurut pemahaman negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana konsep pembangunan dirumuskan sebagai Pembangunan Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang selain mengejar aselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional (Todaro 2000).

Menurut Denis Goulet yang dikutip dalam Todaro (2000), pembangunan lebih mengarah kepada perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyalarsan keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut. Lebih rinci pembangunan, Goulet berpendapat bahwa pembangunan adalah berpindahinya dari suatu kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan kepada suatu kondisi yang menyenangkan yang dianggap "lebih baik" atau yang lebih berperikemanusiaan secara material dan spiritual.

Pembangunan berperikemanusiaan menurut Goulet, dicapai melalui tiga nilai inti, yaitu: (i) nafkah hidup yang diartikan dalam pemenuhan kesejahteraan individu yang sering diukur dalam

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

bentuk pendapatan per kapita; (iii) bebas dari perbudakan dan dapat memilih yang diartikan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum; dan (iii) harga diri (*self-esteem* dan *self-respect*).

Menurut Todaro (2000) bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs*), yang terdiri atas: pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan, merupakan nilai inti pertama yang ingin dicapai dalam pembangunan. Bila salah satu diantaranya tidak ada atau penawarannya hanya sedikit, maka disebut dengan “keterbelakangan absolut” itu ada. Nilai inti yang kedua, adalah: bebas dari perbudakan, untuk dapat memilih.

Di mana konsep kebebasan yang dimaksud disini bukan dalam arti politik atau ideologi, tetapi kebebasan disini adalah yang lebih mendasar, yaitu: emansipasi dari keterasingan kondisi-kondisi material dalam kehidupan dan dari perubahan sosial, terhadap alam, kebodohan orang lain, kesengsaraan, lembaga-lembaga dan kepercayaan yang bersifat dogmatis. Dan nilai inti ketiga yang ingin di capai dalam pembangunan adalah: harga diri atau menjadi orang yang memiliki harga diri yang artinya berharga dan terhormat dan tidak digunakan oleh orang lain sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Bentuk dasar dari harga diri adalah: identitas, martabat, sikap hormat, penghargaan dan pengakuan.

Pembangunan menurut Teori Lewis (Todaro 2000) adalah pembangunan ditinjau dan diukur melalui kondisi perekonomian. Di mana perekonomian terkebelakang terdiri atas dua sektor, yaitu: (i) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol atau surplus tenaga kerja. Ini disebabkan oleh penarikan sebagian tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan output sedikitpun; dan (ii) sektor industri perkotaan yang tingkat produktivitasnya tinggi menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten (pedesaan). Perhatian teori ini pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor yang moderen. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor tersebut. Menurut Todaro (1994:93), pembangunan dapat dilihat dari keberadaan dua kondisi masyarakat di dunia (dualistik). Di mana dunia terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu negara-negara kaya dan miskin. Di negara-negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin dan sebaliknya di negara-negara miskin ada segelintir penduduknya yang makmur sejahtera. Pada dasarnya, konsep dualistik ini terdiri dari empat elemen kunci, yaitu: (i) di setiap tempat dan konteks, selalu saja ada sejumlah elemen “*superior*” dan sekaligus “*inferior*”; (ii) koeksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen dan kronis; (iii) kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat; (iv) hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen yang inferior. Dengan demikian apa yang disebut sebagai prinsip “penetesan kemamuran ke bawah” (*trickle down effect*) itu sesungguhnya sulit diterima.

Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menekan elemen-elemen inferior. Teori pembangunan dualistik yang mengakibatkan keterbelakangan karena yang kembangkan justru keterbelakangan (Todaro 1994:94).

Menurut Todaro (1994) bahwa keterbelakangan adalah akibat pelestarian rendahnya taraf hidup, harga diri dan terbatasnya kebebasan (Gambar 2). Rendahnya taraf hidup yang berkaitan erat dengan salah satu bentuk atau yang lainnya dari rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini sebagai akibat dari rendahnya produktivitas rata-rata dari keseluruhan angkatan kerja (*labor force*), bukan hanya dari mereka yang bekerja. Rendahnya produktivitas angkatan kerja dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, dari sisi penawaran adalah masalah kesehatan, gizi, dan sikap terhadap pekerjaan,

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

pertambahan penduduk yang tinggi serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah penganggur (*underemployment*).

Pada sisi permintaan, ketrampilan yang tidak cukup, buruknya unsur pengelolaan dan rendahnya tingkat pendidikan secara keseluruhan disertai oleh adanya impor teknik-teknik produksi hemat tenaga kerja dari negara maju, mengakibatkan terjadinya substitusi modal terhadap buruh dalam berproduksi. Kombinasi dari rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja dan melimpahnya penawaran menyebabkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang rendah menjadi semakin meluas.

Rendahnya pendapatan mengacu kepada rendahnya tabungan dan investasi yang juga menghambat penambahan kesempatan kerja. Rendahnya pendapatan diduga berhubungan pula dengan besarnya keluarga, tingginya kesuburan, karena anak-anak adalah salah satu sumber jaminan ekonomi dan sosial di masa tua bagi keluarga-keluarga yang sangat miskin. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan yang berarti rendahnya investasi, terbatasnya permintaan tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas, dan dengan demikian pendapatannya pun menjadi rendah.

Pendapatan rendah juga mengakibatkan terbatasnya kesempatan pendidikan (pada tingkat nasional dan keluarga) dan kurangnya ketrampilan manajerial. Akibatnya tenaga kerja yang tidak terampil terpaksa harus menghasilkan pada tingkat produktivitas rendah, yang pada gilirannya akan melestarikan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan buruknya kesehatan dan gizi pekerja yang disebabkan oleh kurangnya makanan dan buruknya sanitasi, yang kemudian pada gilirannya merupakan faktor utama buruknya prestasi kerja dan sikap pada ketepatan (waktu), disiplin, dan perbaikan diri.

Rendahnya pendapatan, tingginya tingkat kesuburan, cepatnya pertumbuhan penduduk, tingginya penawaran kerja dan pengangguran, rendahnya produktivitas per kapita, dan akhirnya tetap rendahnya tingkat pendapatan menjadi sangat kronis.

Pembangunan Berkelanjutan

Satu dasar pemikiran yang dikemukakan Haugton *dalam* Satterhwaite (2001), bahwa keberlanjutan suatu kota tidak bisa tercapai secara murni tanpa syarat-syarat di dalamnya, seperti: suatu kota berlanjut adalah pada hakekatnya yang membantu secara efektif menghasilkan tujuan global pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai sebagai hasil akhir suatu proses. Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan menurut konsep Brundlant dalam "*Our Common Future*", yaitu: "*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*"

Satterhwaite *dalam* Satterhwaite (2001), mengaplikasikan pada pembangunan kota sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan pertama: "*Pemenuhan kebutuhan saat ini*", dapat diaplikasikan pada pembangunan kota, dengan cara:
 - 1) Pemenuhan ekonomi, termasuk akses mata pencaharian yang memadai atau aset produktif; juga keamanan ekonomi ketika tidak memiliki pekerjaan tetap, sakit, cacat atau apa saja untuk suatu keamanan mata pencaharian.
 - 2) Pemenuhan akan sosial, budaya, lingkungan dan kesehatan, termasuk suatu perlindungan bagi kesehatan, keselamatan, kemampuan dan keamanan, di dalam suatu kelompok masyarakat dengan persediaan pipa saluran air, sanitasi, drainase, transportasi, perlindungan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak. Juga sebuah rumah, tempat bekerja dan tempat tinggal yang terlindung dari bahaya lingkungan, termasuk pencemaran bahan-bahan kimia.
 - 3) Pemenuhan politik, termasuk kebebasan berpartisipasi pada politik tingkat nasional dan lokal.
- b. Tujuan pembangunan berkelanjutan kedua: "*...tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya*", dapat diaplikasikan dalam pembangunan kota dalam bentuk:
 - 1) Meminimalkan penggunaan atau limbah dari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, termasuk meminimalkan konsumsi bahan bakar fosil pada kegiatan perumahan, komersil,

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

industri dan transportasi ditambah dengan substitusi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui apabila memungkinkan. Juga meminimalkan limbah dari sumberdaya alam mineral yang langka. Melestarikan aset-aset budaya, sejarah dan alam di dalam kota yang rentan dimusnahkan, dimana aset-aset ini menyediakan ruang-ruang bermain, rekreasi dan akses ke alam.

- 2) Pemanfaatan yang berkelanjutan bagi keterbatasan sumberdaya alam terbaharukan. Contoh: kota-kota menarik sumber alam air pada tingkatan yang dapat berlanjut (dengan mengedepankan cara daur-ulang dan pemanfaatan kembali).
- 3) Limbah organik tidak lebih dari batasan kemampuan sumber alam sungai atau danau memperbaharui kembali (contoh: kapasitas sungai mengkurai limbah organik tanpa degradasi ekologi).
- 4) Limbah anorganik atau emisi tidak lebih dari batasan kemampuan daya serap area pembuangan lokal dan global atau menipiskan tanpa memberikan dampak yang merugikan (contoh: dayatahan pestisida; gas-gas rumah kaca dan penipisan ozon).

Secara luas, bahwa pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam suatu kombinasi integritas antara sistem manusia dan sistem alam sebagai interaksi mereka dan kondisi satu dengan yang lain dari waktu ke waktu. Keberlanjutan sistem sosial ekologi adalah suatu proses dinamika dari pembangunan, tidak suatu kondisi yang statis. Suatu keberlanjutan sistem adalah ketahanan sistem terhadap gangguan dan mudah beradaptasi (Raskin *et al* 1996).

Menurut Raskin *et al* bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kualitas dari pasangan sistem manusia dan sistem lingkungan yang keduanya memiliki dimensi biofisik dan sosial ekonomi. Di mana keberlanjutan biofisik mencari dan memelihara sistem alam, siklus bio-geokimia, dan sumber daya alam untuk pembangunan manusia.

Pembangunan berkelanjutan tidak semata-mata terpusat pada pikiran pada persoalan-persoalan lingkungan. Lebih luas, pembangunan berkelanjutan meliputi tiga bidang: ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk mendukung ini, beberapa teks Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada World Summit 2005 merujuk pada "*tiang-tiang ini saling ketergantungan dan saling memperkuat*" dari keberlanjutan pembangunan sebagai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Menurut catatan *World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide Fund for Nature*, yang dikutip dalam Giddings & O'Brien (2002), bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya suatu bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang tetapi juga, "*meningkatkan mutu dari kehidupan selama dalam daya-dukung yang mendukung sistem alam (ekosistem)*".

Menurut Giddings & O'Brien (2002), hal ini merupakan suatu strategi pembangunan dalam kaitan menjaga keseimbangan sosial, kebutuhan lingkungan dan ekonomi oleh semua orang untuk memastikan suatu mutu hidup (*quality of life*) yang lebih baik. Menurut Giddings & O'Brien (2002), strategi ini memiliki empat sasaran dalam mencapai format keberlanjutan pembangunan, yaitu: (i) kemajuan sosial yang diperlukan oleh semua orang; (ii) perlindungan yang efektif terhadap lingkungan; (iii) penggunaan sumber alam yang bijaksana; (iv) pemeliharaan kestabilan dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketenaga-kerjaan.

Menurut Ravetz (2000) bahwa pembangunan berkelanjutan pada akhirnya adalah "keseluruhan baik dari pada hasil dari bagian per bagian", masalah dan solusi dalam pembangunan berkelanjutan saling berkaitan satu dengan yang lain, antara sektor-sektor, aktivitas-aktivitas, agen-agen dan individual, meski fungsi mereka saling tumpang tindih, berkompetisi dan terpisah-pisah dan untuk agenda pembangunan berkelanjutan diperlukan sesuatu untuk mengintegrasikannya.

Pembangunan berkelanjutan perlu menjadi dasar terhadap prinsip-prinsip dimana akan dilaksanakan semua isu-isu yang diklasifikasikan sebagai lingkungan, sosial, ekonomi atau campuran antara ketiganya, dan menurut Haughton (1999) ada lima prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) *futurity – inter-generational equity*; (ii) *social justice–intra-generational equity*; (iii)

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

transfrontier responsibility–geographical equity; (iv) procedural equity–people treated openly and fairly and (v) inter-species equity importance of biodiversity.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus diupayakan secara sadar, dan ini tercantum dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bab I, Pasal 1 (3) bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Seperti juga ekosistem alami, ekosistem perkotaan terdiri atas sistem individu dan sistem berlapis dari tiga bidang, yaitu: (a) lingkungan alami, (b) lingkungan terbangun, (c) lingkungan sosio ekonomi. Masing-masing sistem memerlukan dinamika dan integrasi yang berimbang. Juga saling ketergantungan dan interaksi antara setiap sistem dan antara ekosistem perkotaan sebagai suatu keseluruhan dan ekosistem lain yang perlu dipahami.

Tak sehatnya ekosistem perkotaan dapat menyebabkan degradasi lingkungan lokal dan luas, masalah-masalah sosial, kemunduran ekonomi, masalah kesehatan manusia dan lebih lanjut putusnya hubungan dari alam. Oleh karena itu, kota-kota yang berkelanjutan sangat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Leitmann 1999).

Menurut Haughton & Hunter (1994), bahwa keberlanjutan perkotaan atau kota berkelanjutan adalah wilayah yang memiliki masyarakat yang secara terus-menerus berusaha keras untuk memperbaiki alam mereka, membangun lingkungan dan kebudayaan dengan menyisipkan cara-cara yang selalu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara global di tingkatan kelompok keluarga-keluarga sampai dengan tingkatan wilayah.

PARADIGMA KEMISKINAN

Kemiskinan tidak semata-mata dibatasi pada masalah pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kerentanan terhadap goncangan, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Mangunwijaya berpendapat bahwa kemiskinan timbul karena struktur, sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat sebaliknya, struktur bukan satu-satunya faktor dalam hubungannya dengan kemiskinan (Rahmat 1999:5).

Menurut catatan Rahmat, kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai manusia yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di mana budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka “budaya kemiskinan” segera pula ditinggalkan.

Jadi orang miskin tidak berbeda dengan orang kaya, mereka hanya mempunyai posisi yang tidak menguntungkan. Menurut Rahmat 1999:6), kemiskinan disebabkan karena sistem ekonomi dan politik memaksakan begitu, orang menjadi miskin karena dieksploitasi.

Konsep kemiskinan menurut Bappenas (2002) adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Menurut Chamber yang dikutip dalam Suryawati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1)kemiskinan (*proper*), 2)ketidakberdayaan (*powerless*), 3)kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4)ketergantungan (*dependence*), dan 5)keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Sehingga, menurut UNDP (2000), kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi seseorang (individu) yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan tidak memiliki kemampuan dasar

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

manusiawi untuk menunjang keberlanjutan hidup. Hak-hak dasar terdiri adalah hak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hal ini didukung oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005), yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga apabila tidak terpenuhinya satu hak maka dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya (Komite Penanggulangan Kemiskinan 2005: 9).

Menurut Nasikun yang dikutip dalam (Suryawati 2005), bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Nasikun dalam Suryawati 2005).

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Suparlan dalam Masjkuri 2007).

Di mana standar kehidupan yang rendah didorong oleh suatu kondisi atau keadaan di mana individunya mengalami keterbatasan pilihan dan kemampuan (*lack of choice and capability*) (Amartya Sen yang dikutip dalam Sari 2003).

Menurut Friedman (1992:67), kemiskinan merupakan kesenjangan (ketiadaan) akses terhadap unsur-unsur kekuasaan sosial (*social power*), yang mencakup aspek-aspek, yaitu:

- a. Ketiadaan tempat tinggal, atau ruang untuk tinggal (*defensible life space*), termasuk di dalamnya lingkungan fisik dimana keluarga memasak, makan, tidur dan menyimpan benda-benda pribadi
- b. Ketiadaan waktu (*surplus time*), jumlah waktu yang tersedia untuk dapat memperoleh kebutuhan subsistensinya
- c. Pengetahuan dan ketrampilan (*knowledge and skills*), termasuk di dalamnya tingkat pendidikan yang rendah dan pelatihan ketrampilan tertentu untuk bekerja
- d. Informasi tepatguna (*appropriate information*), termasuk di dalamnya informasi mengenai segala aspek kehidupan juga kesempatan ekonomi, seperti metode produksi yang baik, metode sanitasi yang baik, metode pemeliharaan balita, ketersediaan akses terhadap pelayanan umum, dan lain sebagainya.
- e. Organisasi sosial (*social organization*), baik organisasi formal maupun informal.
- f. Jaringan sosial (*social networks*), berupa akses untuk melakukan kegiatan kerjasama (*reciprocity*) bagi munculnya tindakan pribadi yang mandiri (*self-reliant action*). Keluarga yang mempunyai akses jaringan kerjasama horisontal yang luas antar sesama keluarga yang lain atau dengan lembaga lain akan mempunyai ruang gerak kegiatan yang lebih luas dibanding dengan yang tidak memilikinya.
- g. Alat kerja dan kehidupan (*instruments of work and livelihood*), tercakup di dalamnya alat-alat produksi bagi keluarga.
- h. Sumberdaya keuangan (*financial resources*), termasuk di dalamnya tingkat pendapatan keluarga dan akses terhadap sumber kredit baik formal maupun informal.

Namun menurut Soetrisno (1997:16-17) bahwa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat sangat berbeda, tergantung dari budaya yang hidup pada masyarakat. Di mana kemiskinan pada suatu masyarakat dikaitkan dengan akibat pembangunan yang dianut dalam suatu negara, di mana model pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada kelompok manusia dalam negara yang menganut model tersebut.

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

Pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Muhammad Yunus, seorang ahli ekonomi yang juga penerima hadiah nobel perdamaian 2006, menyatakan bahwa: “dunia kemiskinan tidak dibikin oleh rakyat miskin”. Menurutnya, kemiskinan diciptakan dan dilestarikan oleh sistem sosial-ekonomi yang kita rancang sendiri; pranata-pranata dan konsep-konsep yang menyusun sistem itu; kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan. Selanjutnya menurut Yunus (2007) bahwa kemiskinan tercipta karena kerangka teoritis dibangun berdasarkan asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep terlampau sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan kredit, kewirausahaan, lapangan kerja) atau mengembangkan lembaga-lembaga yang belum matang (seperti lembaga-lembaga keuangan yang mengikutsertakan kaum miskin). Akhirnya Muhammad Yunus (2007:267-268) menyimpulkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat, sehingga orang miskin itu ibarat pohon bonsai. “Orang miskin itu orang bonsai. Tak ada salah dengan bibitnya. Sederhana saja, masyarakat tak pernah memberi mereka lahan untuk bertumbuh kembang. Yang diperlukan untuk membuat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan adalah menciptakan lingkungan yang memberdayakan mereka. Bagi kaum miskin bisa melejitkan energi dan kreatifitas mereka, kemiskinan akan lenyap dengan cepat“ (Yunus 2007:269).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh kaum radikal bahwa kemiskinan disebabkan oleh peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, di mana kemiskinan disebabkan karena sistem ekonomi dan politik memaksakan begitu, dan orang menjadi miskin karena dieksploitasi (Rahmat 1999:6). Menurut kaum liberal yang dikutip dalam Rahmat (1999:6) bahwa kemiskinan adalah budaya, di mana semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit. Manusia sebagai manusia yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dan apabila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka “budaya kemiskinan” segera pula ditinggalkan.

Oleh karena itu pula, Muhammad Yunus (2007) sangat meyakini bahwa kemiskinan sangat mungkin dihapuskan dari dunia, karena kemiskinan bukan sifat alamiah manusia, kemiskinan merupakan suatu paksaan bagi mereka (orang miskin). Dari pernyataan Muhammad Yunus, dapat disimpulkan kondisi kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh diri masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Kadir yang dikutip dalam Masjkuri (2007) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

KEMISKINAN PERKOTAAN

Kemiskinan dan kesejangan merupakan suatu hal yang mencakup keterbelakangan (*underdevelopment*) (Usman 2004:33). Kemiskinan biasanya termanifestasi dalam kondisi (keadaan) kehidupan masyarakatnya. Kondisi kemiskinan perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Kemiskinan di desa terjadi akibat involusi atau pengadaan pekerjaan yang sama oleh jumlah penduduk yang lebih banyak terhadap penggarapan tanah yang tetap dan terbatas luasnya, sehingga terjadi “penyempitan” tanah garapan (Susanto 1984:104). Sedangkan kemiskinan di perkotaan, menurut Prof. Astrid Susanto terjadi akibat adanya arus surplus negatif dari kota kembali ke desa. Masyarakat miskin kota menurut Baharoglu & Kessides (2001), terdiri dari kelompok-kelompok dengan kebutuhan yang berbeda dan tingkat serta jenis kerentanan yang berbeda pula. Menurut catatan BPS yang dikutip dalam Usman (2004:36) bahwa jumlah penduduk miskin di desa biasanya lebih besar dari pada di kota. Oleh karena itu pula, kemiskinan di desa berkaitan dengan kemiskinan di kota. Menurut laporan Worldbank (2003), kemiskinan diperkotaan ditandai oleh tingginya pengangguran yang diikuti dengan peningkatan tekanan sosial terhadap masyarakat kota, yang selanjutnya mengakibatkan tingginya kerentanan terhadap kemiskinan. Akibat kemiskinan, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, memiliki hak terbatas terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan Worldbank (2003:40).

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

Meskipun definisi kondisi kemiskinan perkotaan berbeda-beda di beberapa negara, namun menurut Baker (2008), gejala-gejala atau fenomena kemiskinannya sama. Gejala-gejala kemiskinan tersebut, adalah: (i)terbatasnya akses mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, (ii)tidak cukup dan tidak amannya kondisi tempat tinggal, (iii)miskin prasarana dan pelayanan; (iv)rentan akan resiko seperti bencana alam, bahaya lingkungan dan resiko kesehatan khususnya yang tinggal di perkampungan kumuh; (v)persoalan ruang yang menghalangi mobilitas dan angkutan dan (vi)ketidaksetaraan.

FEMINISASI KEMISKINAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, dapat dijeneralisaskaikan bahwa kemiskinan lebih banyak di derita oleh perempuan (Todaro 2000:170). Menurut Todaro, bahwa di dunia ketiga terungkap fakta bahwa kaum perempuan beserta anak-anaknya paling menderita kekurangan gizi, paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbadai bentuk pelayanan sosial lainnya.

Todaro (2000:170) mengemukakan bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendah kapasitas mereka mencetak pendapatan sendiri, dan terbatas kontrol terhadap pendapatan suami. Sementara itu lanjut Todaro, bahwa perempuan memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah.

Jadi semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan, tapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan (Shiva 2005:83).

Feminisasi kemiskinan adalah “pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawa garis kemiskinan secara bersama” (Moghadam 2005:7). Menurut kamus Wikipedia, feminisasi kemiskinan didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyimpang menyerang perempuan atau kepala rumahtangga perempuan. Lebih spesifik lagi, hal itu adalah peningkatan dalam perbedaan tingkat kemiskinan antara perempuan dan laki-laki atau antara perempuan melawan laki-laki dan pasangan kepala rumah tangga-rumah tangga. Dapat berarti juga sebagai peningkatan ketidaksetaraan peran jender.

Namun, menurut Vandana Shiva (2005), bahwa persepsi terhadap kemiskinan yang ada saat ini hanyalah diakibatkan oleh persoalan tiadanya pola-pola konsumsi yang biasanya terjadi di Barat, atau persoalan tiadanya pemasukan kapital yang cukup dan oleh karenanya kemiskinan itu tidak mungkin di atasi hanya dengan kemandirian ekonomi, atau mengatasi kemiskinan yang diakibatkan kerusakan lingkungan lewat pembangunan. Dan menurut Shiva, kesemua itu telah menimbulkan kelangkaan sumberdaya alam tersebut, yang merupakan basis pertahanan ekonomi kaum perempuan, yang mengakibatkan pemiskinan perempuan.

Berdasarkan dokumentasi Ester Boserup *dalam* Shiva (2005:83), ternyata pemiskinan perempuan semakin meningkat ketika diterapkan peraturan kolonial; di mana pembuat aturan tersebut telah sekian ratus tahun menaklukkan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya keahlian (*skill*), tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja.

Menurut catatan Shiva (2005:83) bahwa PBB menganggap kemajuan posisi ekonomi kaum perempuan akan mengalir otomatis seiring terjadinya perluasan dan penyebaran proses pembangunan. Namun, diakhir dekade (pada laporan sepuluh tahunan PBB), justru pembangunan itu sendiri yang menjadi pangkal masalah bagi perempuan. Dan berdasarkan laporan situasi sosial dunia 1997 oleh badan PBB (1997), bahwa dari 1,3 milyar warga dunia yang masuk kateogri miskin, 70% nya adalah perempuan.

Pemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (i)akses perempuan terhadap pekerjaan; (ii)akses terhadap upah yang sama; (iii)akses pendidikan; dan (iv)beban pekerjaan.

Akses Perempuan Terhadap Pekerjaan

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

Adanya keterbatasan akses terhadap pasar kerja dan kecenderungan perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil dari pada laki-laki, sementara memasuki pasar tenaga kerja. Di Indonesia ada sekitar 85,3% tingkat partisipasi laki-laki untuk semua tingkatan pendidikan dan 46,3% untuk partisipasi kerja perempuan (Noerdin *et al* 2006:8). Akhirnya perempuan lebih banyak berada di sektor informal. Terjadi pula diskriminasi pekerjaan dengan mencantumkan seperti pencantuman kata-kata "penampilan menarik" sampai hal yang bisa menjurus pada pelecehan seksual ketika syarat yang ditetapkan perusahaan adalah harus memakai rok pendek (Kompas, 16 September 2002).

Berbagai alasan perusahaan melakukan diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, yaitu: pertama, prasangka pekerjaan tertentu hanya bisa dilakukan laki-laki, atau perempuan hanya cocok melakukan kerja tertentu, kedua, peraturan tentang hak-hak pekerja perempuan, sehingga merekrut pekerja perempuan dianggap "merugikan" perusahaan. Contohnya, aturan tentang cuti, khususnya cuti haid dan cuti melahirkan. Menurut Edi Prijono (Kompas, 19 Mei 2007), bahwa peraturan ini positif, karena sangat melindungi pekerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya. Akan tetapi, dari sudut pandang perusahaan, ketentuan ini membuat pekerja perempuan sangat berpotensi memiliki hari kerja lebih rendah daripada laki-laki, sementara gajinya harus terus diberikan ketika cuti.

Akses Perempuan Terhadap Upah yang Sama

Perempuan mengalami masalah diskriminasi upah. Buruh perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Menurut data yang dikemukakan Edy Prijono (Kompas, 19 Mei 2007), secara rata-rata keseluruhan buruh perempuan hanya menerima 74 persen dari upah yang diterima buruh laki-laki.

Perbedaan upah buruh itu konsisten di setiap provinsi, dengan rasio upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang bervariasi, seperti di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain.

Diskriminasi upah merupakan pembedaan upah buruh pada pekerjaan, kualifikasi, jam kerja, kinerja, serta kondisi lain yang semuanya sama. Jadi, pembedaan upah dilakukan semata-mata karena pertimbangan jenis kelamin ungkap Edy Prijono. Peraturan Menteri No.04/1988 juga menguatkan diskriminasi dengan membolehkan buruh perempuan untuk tidak mendapat tunjangan kesehatan apabila suaminya telah mendapat tunjangan dari perusahaan yang sama atau dari perusahaan lain (Sari 2004).

Fakta-fakta lain yang terjadi terhadap pendiskriminasian upah perempuan di Indonesia, dikemukakan oleh Ari Sunarijati (2007) pada diskusi "Perdagangan Perempuan dan Hak Bekerja" diselenggarakan oleh CEDAW *Working Group Initiative* (CWGI) pada 8 Februari . 2007, sebagai berikut:

- a. Buruh/pekerja perempuan selalu dianggap berstatus lajang, meski telah berkeluarga mempunyai anak dan suaminya tidak memperoleh jaminan social apapun. Karena berstatus lajang maka buruh/pekerja perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga maupun jaminan social bagi suami dan anak-anaknya. Padahal semua UU yang mengatur menyatakan non diskriminasi, ternyata masih sangat sulit diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
- b. Potongan pajak penghasilan bagi buruh/pekerja perempuan lebih besar daripada laki-laki lantaran buruh perempuan bersatatus lajang, bukan kepala rumah tangga, walaupun pada kenyataannya suaminya sedang tidak bekerja.
- c. Jaminan Sosial, UU No. 3 tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 16 jelas mengatur "*Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan*". Keluarga buruh/pekerja perempuan selalu miskin karena peraturan-perundangan tidak jalan.
- d. Pengupahan, sampai batas Upah Minimum (UM) Regional/Propinsi/ Kabupaten/Kota masih sama untuk pekerjaan yang sama nilainya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau sudah lebih dari UM tersebut mulai perbedaan atas nama jabatan, tunjangan keluarga, dan alasan lainnya.

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

- e. Promosi jabatan, perempuan sangat sulit memperoleh promosi jabatan. Perempuan pada umumnya masuk kerja di sektor industri padat karya seperti perusahaan garmen, sepatu, rokok, elektronik. Sektor industri ini tidak memerlukan tenaga kerja yang profesional, namun cukup dengan ketekunan, lama kelamaan menjadi trampil. Sistem kerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun. Para perempuan yang hanya berpendidikan SD dan bahkan buta huruf-pun dapat bekerja disitu.
- f. Training, selain pada saat masuk kerja tidak ada lagi training bagi buruh/pekerja perempuan, inipun utamanya diperusahaan tekstile pemintalan dan elektronik, di garmen tidak ada training.
- g. Usia kerja, para buruh perempuan yang sudah berusia 40 (empat puluh) tahun di usik terus oleh pihak pengusaha agar tidak tahan lagi bekerja kemudian mengundurkan diri dan diganti oleh tenaga kerja perempuan yang baru lulus sekolah baik SMP, SMU dan masih lajang.

Akses Pendidikan

Survei demografi di 40 negara (Bank Dunia 2001) memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan ibu, makin rendah angka kematian bayi. Bahkan, menurut Bank Dunia (2000) bahwa seorang ibu yang menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun akan menurunkan angka kematian bayi secara signifikan dibandingkan dengan para ibu yang tidak tamat sekolah dasar. Angka kematian bayi ini bahkan semakin rendah bila para ibu menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama (Kompas, 24 Mei 2004).

Penyediaan akses pendidikan dasar di Indonesia cukup baik, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai 97% baik laki-laki dan perempuan, namun akses ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan (Noerdin *et al* 2006). Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 jumlah perempuan umur 10 tahun keatas yang belum atau tidak pernah sekolah dua kali jumlah laki-laki (11,56% : 5,43%). Dari data ini terlihat, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sulit bagi perempuan mengaksesnya. Laporan dari UNDP ini semakin relevan apabila kita melihat realitas kualitas Sumber Daya Manusia kaum perempuan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan data yang ada di Sub-Direktorat Pendidikan Keaksaraan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah – Depdiknas, tidak kurang ada 11.200.000 orang kaum perempuan di Indonesia yang tercatat masih menyandang buta aksara, di mana 9,7% dari angka tersebut adalah kaum perempuan yang berusia antara 10-45 tahun (Media Indonesia, 11 Juli 2005).

Beban Kerja Perempuan

Akibat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, maka perempuan diwajibkan melakukan tugas-tugas domestik/rumah tangga (seperti: mencuci piring, mencuci pakaian, menjaga anak, membersihkan rumah). Sementara itu, laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarga (tugas-tugas publik). Tugas ini akan menjadi berat terjadi pada keluarga miskin yang harus mempertahankan kehidupan di kota. Perempuan-perempuan miskin tidak hanya melakukan tugas wajibnya di ranah domestik, tetapi juga mereka harus bekerja di ranah publik untuk menambah biaya kehidupan keluarganya. Hal ini juga dikemukakan oleh Mead *dalam* Sajogio (1983) bahwa beban berat masih pada keluarga tidak mampu, karena untuk semua pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Menurut laporan Sari (2004) bahwa, untuk kerja penuh waktu pun (antara 35-74 jam/minggu) lebih banyak diterima oleh laki-laki (71,6%), dibanding perempuan (48%), dan mayoritas pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang panjang (di atas 75 jam/minggu) juga perempuan (44%). Tingginya jumlah perempuan yang bekerja dalam jam kerja yang panjang membuktikan bahwa perempuan harus bekerja lembur untuk menutupi/mengkompensasi upah rendah yang ia terima. Sementara, sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja penuh waktu adalah akibat keharusannya untuk mengerjakan kerja rumah tangga pada saat yang bersamaan.

PENUTUP

Sistem dalam perkotaanpun tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan perannya, terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi. Di perkotaan, angka

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

pengangguran perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan kemajuan karena semakin banyak perempuan yang aktif secara ekonomi dengan mencari pekerjaan. Tetapi pada sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan umumnya lebih terbuka lebar bagi laki-laki, karena sifat pekerjaan yang sesuai untuk perempuan umumnya lebih spesifik dan tingkat pendidikan perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Secara nasional penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar sebesar 27,29% dan didominasi oleh laki-laki (28,22% berbanding 25,57%) (BPS 2006). Selain itu, perempuan tak memiliki kesempatan seluas kaum laki-laki, kondisi kehidupan perempuan tidak pernah dimasukkan sebagai “indikator” pembangunan (Shiva 2005:84). Shiva juga mengemukakan di dalam bukunya Ecofeminisme bahwa kehidupan perempuan sama seperti lingkungan alam. Hal ini terlihat dari pengabaian dua persoalan yang tidak terlihat. Pertama, kontribusi alam dan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi pasar diabaikan. Teori ekonomi yang dominan menempatkan tugas mencari nafkah dan kerja domestik oleh perempuan sebagai pekerjaan yang tidak bernilai dan oleh karena itu secara statistik tidak terlihat. Kedua, dampak negatif dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap perempuan dan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, perempuan mempunyai peran penting dalam mengelola lingkungan hidup dan pembangunan, partisipasi penuh perempuan merupakan hal yang mendasar untuk mencapai keberlanjutan pembangunan.

“Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development”. (Principle 20-Rio Declaration on Environment and Development-The United Nations Conference on Environment and Development, 1992).

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Lengerman & Brantley (2003:404-405) tentang situasi dan kondisi perempuan akibat pembangunan suatu masyarakat telah menghasilkan penemuan-penemuan yang memberikan gambaran kehidupan perempuan. Di mana gambaran tersebut merupakan representasi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang mendasar.

Pembasmian atau penghapusan kemiskinan tidak akan terpenuhi hanya pada program-program anti kemiskinan. Tanpa adanya keikutsertaan dan perubahan struktur ekonomi dalam rangka memastikan akses bagi semua perempuan ke sumber daya, peluang dan pelayanan publik tidak diberikan.

The eradication of poverty cannot be accomplished through anti-poverty programmes alone but will require democratic participation and changes in economic structures in order to ensure access for all women to resources, opportunities and public services.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm>

Selain pembasmian kemiskinan, juga keadilan sosial dan kesetaraan adalah dua aspek yang penting dan merupakan pilar utama dalam penghapusan kemiskinan.

“Eradication of poverty based on sustained economic growth, social development, environmental protection and social justice requires the involvement of women in economic and social development, equal opportunities and the full and equal participation of women and men as agents and beneficiaries of people-centred sustainable development”. (Principle 16. Beijing Declaration, Action for Equality, Development and Peace. 1995)

REFERENSI

- Baharoglu, D & C, Kessides. 2001. Urban Poverty. *Asian City Development: City Profiles Haiphong (Socialist Republic of Vietnam)2000 Draft for Comments.*
- BAPPENAS. 2002. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: agglomeration of Jakarta. Jabodetabek. Jakarta.
- BAPPENAS. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Makro Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- BAPPENAS, BPS & UNPF 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025. Jakarta.
- Cahyono, I. 2005. Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan. Jurnal Perempuan No. 42. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Clapham, W.B, Jr. 1973. *Natural Ecosystem.* Macmillan Publishing, Co. New York.

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

- Friedman, D & H., Michael. 1988. *The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research*. Sociological Theory 6:201-218.
- Giddings, B, B. Hopwood & G. O'Brien. 2002. *Environment, Economy and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development*. *Sust. Dev.*10,187-196(2000). Sustainable Cities Research Institute, Newcastle upon Tyne. UK.
- Haughton, G & C. Hunter. 1994. *Sustainable Cities*. Jessica Kingsley Publishers London and Bristol. Pennsylvania.
- International Labour Organization (ILO). 2004. Jender dan Kemiskinan, www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/nletter04.pdf, diakses 5 Mei 2007
- UNDP *Poverty Report 2000*. <http://www.undp.org/povertyreport/>
- Keats D. 2004. *The Meaning of Development, Sustainable Development and Rural Development*. South Africa. NetTel@Africa Off-Line. <http://elearn.nettelafrika.org/>
- Leitmann, J. 1999. *Sustaining Cities Environmental Planning and Management in Urban Design*. McGraw-Hill Profesional Architecture. New York.
- Lengerman, P.M. 2003. *Teori Feminis Modern dalam Teologi Sosiologi Modern*. Terj. dari *Moderen Sociological Theory*, Six Edition by George Ritzar & Douglas J. Goodman oleh Alimandan. Prenada Media. 2003 (653 hlm).
- Moghadam, V.M. 2005. *Globalizing women: Transnational feminist networks*. MD: The Johns Hopkins University Press. Baltimore
- Masjkuri, S.U. 2007. Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kampung Kumuh di Kota Surabaya. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. www.damandirionline.com.
- Sajogio, P. 1983. Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa. Penerbit CV Rajawali. Jakarta (379 hlm).
- Satterthwaite, D. 2002. *The ten and a half myths that may distort the urban development policies of governments and international agencies*. IIED. London
- Satterthwaite, D. 2000. *Seeking an understanding of poverty that recognizes rural-urban linkages and rural-urban differences*. IIED. London
- Satterthwaite, D & C .Tacoli. 2003. *The urban part of rural development: the role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction*. IIED working paper. London
- Sari, D.I. 2004. Hak-hak Sosial Ekonomi Buruh Perempuan: Edisi I No.4 Desember 2004
- _____. 2003. Perempuan dan Pengambilan Keputusan Dalam *Good Governance Project* (Studi Kasus: Program Pengembangan Kecamatan Pamanukan Sebrang, Jawa Barat). *Jurnal Analisis Sosial* Vol.8 No.2 Oktober 2003. Yayasan Akatiga. Bandung (hal. 93-110).
- Yunus, M & A. Jolis. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Terj dari *Vers un monde sans pauvrete* oleh Irfan Nasution dan Robert M.Z Lawang. PT. Cipta Lintas Wacana. Serpong (269 hlm).
- Yunus, M & K. Weber. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Terj. dari *Creating World Without Poverty* oleh Rani R. Moediarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta (261 hlm).
- Noerdin, E. 2006. Potret Kemiskinan Perempuan. Women Research Institute. Jakarta (161 hlm).
- Rahmat, J. 1999. Sufisme dan Kemiskinan dalam Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan kita tentang Islam/penyunting. Sri Edi Swaono, Al Muzzammil, Amri Yusra. UI Press. Jakarta.
- Rahmat, J. 2005. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Ravetz, J. 2000. *City-Region 2020 - Integrated planning for a sustainable environment*. Earthscan Publications Ltd. London
- Satterthwaite, D .2001. *Seeking an understanding of poverty that recognizes rural-urban linkages and rural-urban differences*. IIED. London
- Satterthwaite, D. 2002. *The ten and a half myths that may distort the urban development policies of governments and international agencies*. IIED. London
- Shiva, V & M, Mies. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Terj. dari *Ecofeminism* oleh Kelik Ismunanto & Lilik. IRE Press. Yogyakarta (379 hlm).

PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA

- Soetaryono Retno. 1985. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kerusakan Sos-Ek – Suatu Studi kasus di Kecamatan Jatiujung Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Jakarta. Tesis Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia. Tidak Dipublikasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soetrisno, L. 1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan. Kanisius. Jakarta (197 hlm).
- Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2005. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan. Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta
- Susanto, A.S. 1984. Sosiologi Pembangunan. Binacipta. Jakarta (191 hlm).
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK Vol. 08/No.03/September/2005*. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah
- Susanto, A.S. 1984. Sosiologi Pembangunan. Binacipta. Jakarta (191 hlm)
- Sunarijati, A. 2007. Permasalahan Hak Bekerja Bagi Perempuan. *Jurnal Perempuan*. Jakarta.
- Todaro, M. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terj.dari *Economic Development in The Third World Fourth Edition*, oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. Penerbit Erlangga. Jakarta. (378 hlm)
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Haris Munandar. Bumi Aksara Jakarta.
- Teune, H. 1988. *Growth*. Volume 167 Sage Library of Social Research. London
- Usman, S. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar. Yogyakarta (309 hlm).
- World Bank. 2003. *East Asia Urban Working Paper Series, Kota-Kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*. Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region The World Bank. Jakarta
- Ravallion, M. 2001. *Poverty Comparisons*. World Bank.
- United Nation (PBB). 1997. *A United Nations Objective: Eradicate Poverty* Published by the United Nations Department of Public Information - DPI/1933, November 1997.